



PENETAPAN

Nomor 278/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan:

SURJAMAN DJAJA, Tempat/Tanggal Lahir: Jakarta, 10 Mei 1957, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Kristen, Pekerjaan: Pensiunan, Alamat: Apt. Sunter Park View Tower A Blok AD/1609, RT 003 RW 015, Kel. Simter Jaya, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti tulisan yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 10 Juni 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 10 Juni 2020, di bawah register perkara No. 278/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Utr., telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon warga Negara Republik Indonesia berdasarkan Kartn Tanda Penduduk Nomor . 3172061005570002 atas nama SURJAMAN DJAJA;
2. Bahwa Pemohon adalah Kepala Keluarga dengan Kartu Keluarga Nomor : 3172061501111025;
3. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Perempuan pilihan Pemohon yang bernama JOHANA SUWARNI di Jakarta pada tanggal 04 November 1992, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 2373/1/1992;
4. Bahwa setelah menikahi suami - istri, sama -sama bekerja dan mempunyai penghasilan masing-masing yang cukup untuk menopang biaya kehidupan pribadi maupun keluarga, bahwa pemohon tetap bertanggungjawab sepenuhnya atas kesejahteraan keluarga sesuai dengan kedudukannya sebagai kepala keluarga;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak:

Hal 1 dari 7 hal, Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- GIOVANNI TERESA, anak ke satu perempuan, lahir di Jakarta, pada tanggal 12 Desember 1992,
 - REYNOLD HARTANTO, S, anak ke dua laki-laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 03 Desember 1995,
6. Bahwa sebelum menikah Pemohon dengan JOHANA SUWARNI sudah membuat Perjanjian Harta Perkawinan, yang dibuat dihadapan Notaris J.L WAWORUNTU dengan Akta Notaris Nomor : 149 tertanggal, 10 Agustus 1992, yang menyebutkan para pihak menghadap menerangkan, tidak ada gabungan harta antara Suami - Istri;
7. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Johana Suwami Tjajawati telah nyata tidak ada harta bersama yaitu harta masing-masing, sebagaimana Akta Perjanjian Harta Perkawinan Nomor: 149;
8. Bahwa karena ketidaktahuan pemohon terhadap peraturan hingga saat ini Peijanjian harta perkawinan belmn mendapat pengesahan dari Pengadilan setempat, dimana Pemohon bertempat tinggal;
9. Bahwa Pemohon hendak mengesahkan Perjanjian Harta Perkawinan sebagaimana Akta Notaris Nomor : 149 yang dibuat oleh Notaris J.L Wawonmtu, tanggal 10 agustus 1992, terlebih dahulu adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas bersama ini dengan hormat kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, berkenan menerima dan memeriksa permohonan Pemohon, selanjutnya memberikan suatu Penetapan yang berbimyi sebagai berikut :

1.
Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan sah secara hukum Perjanjian Harta Perkawinan yang dibuat Pemohon sebelum menikah dengan JOHANA SUWARNI selaku istri Pemohon, sebagaimana Akta Notaris Nomor : 149 yang dibuat dihadapan Notaris J.L WAWORUNTU, tertanggal, 10 Agustus 1992

Hal 2 dari 7 hal, Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr.



3. Menetapkan pula biaya-biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, setelah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, Pemohon hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan Pemohon tersebut dipersidangan, Pemohon menyatakan benar, tidak ada perubahan dan mempertahankan seluruh dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti tulisan-tulisan, sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3172061005570002, atas nama Surjaman Djaja, tertanggal 7 Februari 2012 (diberi tanda P-1);
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 317206411068004, atas nama Johana Suwarni tertanggal 17 Maret 2016 (diberi tanda P-2);
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 3172021504190025 atas nama kepala keluarga Surjaman Djaja tertanggal 16 April 2019 (diberi tanda P-3);
4. Foto copy Kartu Keluarga No. 3172061501111025 atas nama kepala keluarga Surjaman Djaja tertanggal 15 Januari 2014 (diberi tanda P-3);
5. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 2373/II/1992, atas nama Surjaman Djaja dan Johana Suwarni Tjahjawati tertanggal 4 November 1992 (diberi tanda P-4);
6. Foto copy Perjanjian Harta Perkawinan Nomor 149 di hadapan Notaris John Leonard atas nama Tuan Surjaman Djaja dan Nona Yohana Suwarni Tjahjawati tertanggal 10 Agustus 1992 (diberi tanda P-5);

Menimbang, bahwa bukti tulisan-tulisan tersebut kesemuanya telah diberi meterai cukup dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya, dan bukti yang diberi tanda P-2 serta P-4 merupakan copy dari copy sehingga formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa disamping bukti tulisan-tulisan tersebut, dipersidangan Pemohon telah pula mengajukan bukti saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang, yang kesemuanya di bawah sumpah menurut hukum agamanya masing-masing telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SURJANI DJAJA, menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;

Hal 3 dari 7 hal, Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama **JOHANA SUWARNI** di Jakarta pada tanggal 04 November 1992;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan membuat Nomor 149 di hadapan Notaris John Leonard tertanggal 10 Agustus 1992;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Johana Suwami Tjajawati telah nyata tidak ada harta bersama yaitu harta masing-masing, sebagaimana Akta Perjanjian Harta Perkawinan Nomor: 149;
- Bahwa karena ketidaktahuan Pemohon terhadap peraturan hingga saat ini Pejianjian harta perkawinan belmn mendapat pengesahan dari Pengadilan setempat, dimana Pemohon bertempat tinggal;

2. MAGDALENA SUANDI, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama **JOHANA SUWARNI** di Jakarta pada tanggal 04 November 1992
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan membuat Nomor 149 di hadapan Notaris John Leonard tertanggal 10 Agustus 1992
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Johana Suwami Tjajawati telah nyata tidak ada harta bersama yaitu harta masing-masing, sebagaimana Akta Perjanjian Harta Perkawinan Nomor: 149;
- Bahwa karena ketidaktahuan Pemohon terhadap peraturan hingga saat ini Pejianjian harta perkawinan belmn mendapat pengesahan dari Pengadilan setempat, dimana Pemohon bertempat tinggal

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, dipersidangan Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan perkara dinyatakan selesai, Pemohon tidak mengajukan sesuatu apa lagi dan menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan sepanjang belum termuat dalam penetapan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah termuat, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon telah memohon penetapan;

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya Pemohon pada pokoknya telah mendalilkan, bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan

Hal 4 dari 7 hal, Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang perempuan yang bernama **JOHANA SUWARNI** di Jakarta pada tanggal 04 November 1992, karena ketidaktahuan Pemohon terhadap peraturan hingga saat ini Pejianjian harta perkawinan belmn mendapat pengesahan dari Pengadilan setempat, dimana Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum serta didukung oleh alat bukti yang cukup, pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulisan yang diberi tanda P-1 dan P-3 berupa: Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3172061005570002, tertanggal 7 Februari 2012 dan Kartu Keluarga No. 3172021504190025 tertanggal 16 April 2019, terbukti bahwa Pemohon berdomisili berdomisili di Jakarta Utara, sehingga oleh karenanya Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulisan yang diberi tanda P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan No. 2373/II/1992, tertanggal 4 November 1992, terbukti bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama **JOHANA SUWARNI** di Jakarta pada tanggal 04 November 1992;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulisan yang diberi tanda P-5 berupa Perjanjian Harta Perkawinan Nomor 149 di hadapan Notaris tertanggal 10 Agustus 1992, terbukti bahwa Pemohon setelah melangsungkan perkawinan dan membuat Perjanjian Pemisahan Harta Kekayaan Nomor 149 di hadapan Notaris John Leonard tertanggal 10 Agustus 1992 dan antara Pemohon dengan Johana Suwami Tjajawati telah nyata tidak ada harta bersama;

Menimbang, bahwa bukti P-5 tersebut dikuatkan oleh keterangan saksi **SURJANI DJAJA** dan **MAGDALENA SUANDI**, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama **JOHANA SUWARNI** di Jakarta pada tanggal 04 November 1992, dan karena ketidaktahuan Pemohon terhadap peraturan hingga saat ini Perjanjian Pemisahan Harta Perkawinan belum mendapat pengesahan dari Pengadilan setempat, dimana Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa Penetapan Pengadilan terhadap Perjanjian Pemisahan Harta Kekayaan akan berakibat hukum yaitu perjanjian tersebut selain mengikat kedua belah pihak (suami istri) juga akan mengikat pada pihak ketiga, sehingga akan menghasilkan kepastian hukum bagi mereka yang membuat perjanjian tentang masing-masing harta kekayaan yang dimiliki oleh suami maupun istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Utara berpendapat bahwa permohonan

Hal 5 dari 7 hal, Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon adalah beralasan menurut hukum serta telah di dukung oleh alat bukti yang cukup, sehingga oleh karenanya harus dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;-

Mengingat, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta pasal pasal dari Undang Undang dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah secara hukum Perjanjian Harta Perkawinan yang dibuat Pemohon sebelum menikah dengan JOHANA SUWARNI selaku istri Pemohon, sebagaimana Akta Notaris Nomor : 149 yang dibuat dihadapan Notaris J.L WAWORUNTU, tertanggal, 10 Agustus 1992;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari: Rabu, tanggal 24 Juni 2020, oleh: Djuyamto, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dihadiri oleh Yeti Sulistiati, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Yeti Sulistiati, S.H.

Djuyamto, S.H.

Hal 6 dari 7 hal, Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr.



Biaya perkara:

1. PNBP	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 75.000,-
3. Panggilan	Rp. 100.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp. 5.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
6. <u>Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 221.000,-